

Keagenan Perempuan pada Krisis Iklim: Dekolonisasi Metode Feminis

The Agency of Women in the Climate Crisis: A Decolonizing Feminist Method

Titiek K. Hendrastiti¹ dan Rahmanta Setiahad²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Bengkulu¹
dan Fakultas Pertanian, Universitas Merdeka, Madiun²
Jalan W.R. Supratman, Kadang Limun, Bengkulu¹ dan
Jalan Serayu Nomor 79, Madiun, Jawa Timur 62133²

titiek_kartika@unib.ac.id¹ dan rahmanta_setiahad@unmer-madiun.ac.id²

Kronologi Naskah: diterima 1 November 2022, direvisi 17 November 2022, diputuskan diterima 5 Desember 2022

Abstract

This article aims to discuss the relationship between the promotion of women's agency and vulnerable groups with the changing trends in the orientation of social research methods towards decolonization in the strands of the feminist approach. All the world communities, especially the marginal groups who have intersectional vulnerabilities, are starting to redefine their experiences in this climate crisis. It is proven that their concrete resilience is genuine, innovative, creative, and able to preserve their lives in a sustainable manner. Our attention should be deeper towards their simple efforts to free themselves from the "oppression of global powers". This research was conducted in two villages of the Exclusive Economic Zone (KEE) *Banyuwangi*, East Java, called *Wringinputih* and *Kedunggebang*. The framework used is postcolonial feminist and applies a feminist political ecology (FPE) method. Fieldwork adopts focus group discussion, field talk, and participatory observation. The doubts of marginal communities about their agency in the climate crisis is a challenge for postcolonial feminist researchers. In fact, by using a feminist postcolonial approach, the practices of forest landscape governance (FLG) clearly record the involvement of women and marginalized groups. Here it is the novelty of the article, a decolonization method in FLG.

Keywords: decolonizing feminist methods, women and climate crisis, the agency of subaltern, feminist political ecology

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan keterhubungan antara pemajuan keagenan perempuan dan kelompok rentan dengan perubahan tren penelitian sosial menuju dekolonisasi metode feminis. Saat ini, kita menghadapi disrupsi situasi sosial-politik sebagai dampak krisis iklim global. Komunitas *subaltern* yang kerentan secara interseksional, mulai meredefinisikan pengalaman mereka dalam krisis ini. Resiliensi konkret mereka sangatlah *genuine*, inovatif, kreatif, dan mampu menjaga kelangsungan hidup mereka secara laten dan berkelanjutan. Perhatian kita selanjutnya menuju ke arah upaya sederhana komunitas membebaskan diri dari "ketertindasan kekuatan global". Penelitian dilakukan di dua desa Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEE) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yakni: Desa *Wringinputih* dan *Kedunggebang*. Kerangka pendekatan yang digunakan adalah feminis poskolonial dan mengaplikasikan metode ekologi politik feminis (FPE). *Fieldwork* mengadopsi diskusi kelompok, *fieldtalk*, dan observasi partisipatif. Keraguan perempuan dan komunitas marginal akan agensi mereka pada resiliensi krisis iklim menjadi tantangan bagi para feminis peneliti. Apabila peneliti feminis mampu mendeklarasikan pengakuan dari pemikiran kelompok marginal sebagai respons terhadap krisis iklim, maka kemajuan sudut pandang tata kelola lanskap hutan (FLG) menjadi sebuah keniscayaan. Pengakuan terhadap metode feminis poskolonial pada FLG menjadi novelti dari artikel ini, atau terjadi dekolonisasi pengetahuan dan metode untuk isu FLG.

Kata kunci: dekolonisasi metode feminis, perempuan dan krisis iklim, keagenan kelompok *subaltern*, ekologi politik feminis

Pendahuluan

Pada dasarnya, kritik terhadap diskursus positivisme dalam pengembangan ilmu pengetahuan telah lama disebut-sebut oleh Harding (1998). Cabaran terhadap ilmu pengetahuan yang berkembang dengan menegasikan sudut pandang dari kelompok-kelompok rentan di luar institusi akademik semakin populer, secara umum disebut sebagai usaha dekolonisasi. Untuk itu, perlu dan penting melacak keterhubungan antara rekognisi keagenan perempuan menuju dekolonisasi pada untaian pendekatan feminis.

Perspektif keadilan gender maupun perspektif perempuan lokal absen dalam konsep tata kelola ekologi dan krisis iklim (Hayhurst & Centeno 2019). Kurauchi et al. (2005) menguatkan tentang posisi kelompok masyarakat lokal dalam tata kelola sumber daya alam di Asia Tenggara: seperti di Kamboja, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Cina. Ada sebagian kelompok masyarakat yang dapat menikmati kesejahteraan, peluang, dan kelestarian lingkungan, tetapi lebih banyak kelompok rakyat yang kesulitan hidup sebagai dampak dari kerusakan ekologis yang parah.

Hayhurst dan Centeno (2019) memberi contoh di Nikaragua, dampak perubahan iklim menghasilkan beban berat bagi perempuan. Dalam konteks usaha merespons perubahan iklim itu, praktik gender justru berjalan sebagai suatu proses opresif yang mengukuhkan identitas perempuan dengan sifat-sifat tertentu sehingga dianggap tidak dapat diubah—kodrati. Ada kekhawatiran bahwa dalam upaya merespons degradasi lingkungan dan adaptasinya, masyarakat justru mengukuhkan penegakan praktik patriarki sehari-hari, termasuk juga mengukuhkan stereotip peran gender tradisional perempuan dan anak perempuan. Tanpa pemeriksaan yang ketat, situasi ini dapat memperburuk pembagian kerja berdasarkan gender, serta berpotensi memperkuat asumsi tentang “hubungan alami perempuan dengan alam”. Temuan riset di Nikaragua membuktikan bahwa ada hubungan antara KDRT dengan deforestasi.

Narasi dan kepentingan tersembunyi dari perempuan dalam isu krisis iklim bukan sekadar tuduhan untuk memenuhi justifikasi cara pandang feminisme, melainkan suatu praksis yang masih terus berlangsung di lapangan. Temuan hasil penelitian tentang komunitas perempuan peduli lingkungan (KPPL) dari desa Pal 8 di kawasan Taman Hutan Nasional Kerinci Seblat (TNKS) menunjukkan bahwa betapa pun kuat keinginan perempuan setempat untuk terlibat pada tata kelola hutan, namun mereka terkendala atas sudut pandang tidak setara pada kebijakan lanskap hutan (Hendrastiti & Kusujarti 2022).

Penelitian di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang dipromosikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan tren yang sama. Hasil studi di Teluk Pangpang Banyuwangi memperlihatkan kurangnya pengakuan atas suara dan kepentingan komunitas perempuan.¹ Praktiknya, skema KEE itu di jalan kurang partisipatif, kelompok perempuan lokal – tidak mampu berpartisipasi pada siklus program, terutama pada perencanaan. Pada studi pendahuluan di bulan Maret 2022, penulis menemukan bahwa regulasi operasional di tingkat desa belum disusun, dan sebagian masyarakat menyatakan tidak mampu memahami bentuk luaran program. *Fieldwork* juga menunjukkan betapa besar fenomena tersembunyi di balik agenda KEE.²

Neksis: Feminisme Poskolonial, Krisis Ekologi, Keagenan

Saat ini, tren dekolonisasi ilmu-ilmu sosial berlangsung sangat cepat, termasuk pada isu krisis iklim serta keagenan perempuan dalam konteks pendekatan feminisme. Keterhubungan feminisme, krisis iklim dan

keagenan perempuan telah menjadi interseksi yang menarik dari studi feminisme kontemporer (Enarson et al. 2017; Kurauchi et al. 2005; DeLoughrey dan Handley 2011).

Enarson et al. (2017) menyatakan bahwa lensa analisis gender pada kajian krisis ekologi dan bencana itu bervariasi dan dinamis.³ Misalnya pendekatan kerentanan sosial, yang meletakkan kerentanan sosial pada bencana itu dengan menunjukkan adanya dinamika sosial yang berakar pada gender, kelas, ras, budaya, kebangsaan, usia, dan hubungan kekuasaan lainnya (konteks interseksionalitas). Selain itu, ada pendekatan ekologi sosial politik yang menekankan pada makna luas dan berfokus pada interaksi. Interaksi di sini tidak terbatas pada interaksi sistem manusia dan nonmanusia, tetapi meliputi semua sistem sosial. Konteks interaksi yang interseksional terutama dalam konteks bencana, mencakup relasi gender, dan potret diskriminasi gender. Faktor ini berkaitan dengan pengabaian hak asasi perempuan dan anak perempuan.

Studi Kurauchi et al. (2005) menjelaskan tentang keunikan situasi politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi pada kelompok perempuan lokal dalam tata kelola sumber daya alam, yaitu: 1) subsidiaritas yang tidak lengkap atau tidak jelas; 2) akuntabilitas ke bawah yang terbatas; 3) kurangnya kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis; 4) desentralisasi yang digerakkan oleh donor; 5) kepemilikan dan manfaat yang terbatas dari sumber daya alam oleh masyarakat lokal; dan 6) koordinasi yang tidak memadai antara aktor pemerintah dan nonpemerintah. Studi ini memperjelas keterhubungan tata kelola dan ketidakhadiran perempuan.

Pada investigasi DeLoughrey dan Handley (2011) tentang isu tata kelola ekologi dan perempuan, menunjukkan bahwa ada kaitan antara krisis iklim dan pemulihan ekosistem. Mereka berkeyakinan bahwa pendekatan poskolonial penting untuk dipakai dalam penelitian semacam ini. Bagi bangsa yang mengalami penjajahan, nilai yang paling penting dan paling konkret adalah tanah. Tanah adalah sumber penghidupan dan simbol kemartabatan mereka. Pada bahasa DeLoughrey dan Handley (2011), fenomena imperialisme merupakan kekerasan geografis. Pola penguasaan tanah terjadi hampir di setiap belahan dunia. Imperialisme mengeksplorasi tanah, memetakan, dan akhirnya mengendalikannya. Bagi pribumi, sejarah perbudakan kolonial diawali dengan hilangnya lokalitas dan identitas geografis mereka, yaitu tanah. DeLoughrey dan Handley (2011) membingkai tulisan poskolonial

secara ekologis, memosisikannya sebagai proses pemulihan, identifikasi, dan pembuatan mitos sejarah. Poskolonial ekologis juga dimaksudkan sebagai upaya pemulihan posisi perempuan sebagai agen lingkungan yang mempromosikan perjuangan yang khas dengan historisitas masyarakat *Global South*. Konsep narasi wilayah dipergunakan untuk mempertanyakan narasi yang dipaksakan oleh kolonial.

Mengikuti model DeLoughrey and Handley itu, lanskap bentang bumi dan laut adalah unsur yang perlu diperhatikan dalam proses kesejarahan dan bukan sekedar pengamatan dari pengalaman manusia. Pelibatan agensi nonmanusia menciptakan tantangan tambahan karena proses regenerasi dan perubahan alam itu sendiri sering berkontribusi pada penghapusan sejarah poskolonial. Pada pembahasan krisis iklim, kita harus memasuki "dialog mendalam dengan lanskap bumi dan ekologisnya".

Resurrección dan Elmhirst (2013) memperjelas uraian Enarson et al. (2017); Kurauchi et al. (2005); dan DeLoughrey dan Handley (2011). Mereka yakin bahwa kompromi antara teori, kebijakan, dan praktik tentang gender, lingkungan, juga tata kelola sumber daya alam tidaklah mudah. Ada unsur-unsur politik, negosiasi, dan kontestasi hubungan sosial yang saling terkait. Mereka percaya bahwa penting melakukan terobosan perspektif feminis kritis untuk menelaah hubungan gender dengan pengelolaan sumber daya alam dalam konteks kebijakan kontemporer. Menurut para pemikir tersebut, tantangan penerapan ekologi feminis poskolonial adalah pemerintahan yang terdesentralisasi, penghapusan kemiskinan, dan 'pengarusutamaan' gender.

Telaah Resurrección (2017) dan Elmhirst (2011) mengarahkan pentingnya menggeser studi isu krisis ekologi ke epistemologi feminis poskolonial. Feminis poskolonial mewakili pendekatan anti-monolitik dan mengakui pengetahuan non-Barat sebagai pengetahuan *multifaced* yang mengakui orang dan komunitas non-Barat sebagai subjek pengetahuan. Cara pandang ini populer pada 1990-an (Saunders 2004; Brah & Phoenix 2004). Dengan perspektif poskolonial ini, agensi, cerita, dan narasi komunitas dari *Global South* menjadi basis pengembangan pengetahuan (Brook 1997; Spivak 2008; Mohanty 2008).

Feminisme poskolonial adalah suatu kerangka menuju dekonstruksi untuk dekolonisasi. Pendekatan ini mendekonstruksi universalisme teori feminisme Barat dan mencabar feminisme liberal, feminisme sosialis, feminisme Marxis, dan feminisme struktural yang telah meminggirkan agensi perempuan dari *Global South*.

Mohanty (2008) memperingatkan bahaya homogenisasi perempuan non-Barat sebagai cerminan dari kelompok tertindas. Spivak (2008) dengan tegas menyatakan bahwa poskolonialisme adalah inovasi utama dalam studi humaniora dan sosial yang berfokus pada komunitas yang dianggap sebagai kelompok *subaltern*, tidak punya identitas dan tersembunyi.⁴

Para pemikir feminis poskolonial secara kritis menguji asumsi bahwa identitas perempuan dari belahan bumi selatan bukan monolitik (Narayan & Harding 2000; Mohanty 2008; Saunders 2004). Teori-teori tersebut berfokus pada perjuangan aktivis perempuan dari *Global South* di tingkat mikro yang memengaruhi gerakan perempuan di tingkat makro. Perjuangan perempuan di tingkat lokal terkait dengan pembentukan identitas mereka, perbedaan realitas yang mereka hadapi, representasi isu yang diangkat, dan politik tubuh mereka.

Menurut Spivak (2008) akibat dari sistem penindasan dan relasi subordinasi yang tajam menyebabkan terbentuknya masyarakat yang 'apati', 'diam', dan menempatkan mereka hanya 'dalam bayangan'. Pada konteks isu ekologi, studi Tierney (2019) menyebutkan bahwa bencana dan pandemi dapat menciptakan ruang bagi perempuan rentan untuk mengekspresikan suara mereka. Bencana dapat membuka selubung struktur dan ketidaksetaraan yang tersembunyi. Penelitian di Aceh, misalnya, menunjukkan bahwa setelah bencana tsunami masyarakat dihadapkan pada situasi mengerikan dan membutuhkan intervensi dari luar, menariknya situasi ini justru memberikan kesempatan bagi perempuan Aceh untuk mengekspresikan agensi mereka dan terlibat dalam partisipasi publik secara lebih luas (Kusujarti 2017).

Pengalaman dari berbagai komunitas *subaltern* menunjukkan pentingnya aksi kolektif di akar rumput sebagai perlawanan ketimpangan. Studi Pollock dan Subramaniam (2016) mencatat bahwa kekuasaan negara dan ketimpangan global menjadi pemicu gerakan sosial untuk melawan struktur kekuasaan yang terjalin dengan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi asing. Relasi kekuasaan menjadi isu utama dalam memperjuangkan keadilan, termasuk keadilan ekologis. Teori dan metodologi yang tertanam dalam struktur hegemonik gagal mengakomodasi perspektif dan pengetahuan kelompok *subaltern*. Akibatnya, budaya, bahasa, dan identitas nasional mereka tidak diperhitungkan sebagai aspek yang relevan untuk memastikan pelibatan secara utuh.

Teori dan metodologi dekolonisasi sangat penting bagi pendekatan feminis poskolonial (Hendrastiti 2014).

Salah satu metode dalam dekolonisasi pengetahuan tentang perempuan di *Global South* adalah dengan memusatkan narasi, praktik, sejarah, dan pengetahuan perempuan lokal, termasuk narasi dan pengetahuan tentang lingkungan mereka; pendekatan ini juga sering disebut sebagai ekologi politik feminis.

Metode Penelitian

Krisis lingkungan telah menjadi perhatian utama berbagai disiplin ilmu dan teori, termasuk pendekatan ekologi politik, ekofeminisme, dan ekokritik (Dar & Bhatt 2019). Isu ini perlu diteliti melalui pendekatan transdisiplin; sebab krisis lingkungan sangatlah kompleks dan bersinggungan dengan budaya, kekuasaan, dan sastra. Bagaimana institusi lokal mereformasi dan mereproduksi diri mereka sendiri serta hubungan gender yang tertanam dalam konteks interseksionalitas adalah cakupan dari ekologi politik feminis poskolonial.

Ekologi Politik Feminis (FPE) adalah kerangka metodologis yang memfasilitasi studi tentang isu-isu gender dan krisis lingkungan (Rocheleau et al. 1996; Sundberg 2015). FPE menekankan studi tentang keterlibatan perempuan sebagai agensi sentral lingkungan. Sayangnya, pengakuan atas keagenan mereka dalam perubahan ekologi dan sumbangan konservasi alam belum sepenuhnya diterima. Perampasan pengakuan tersebut tentunya menghambat perkembangan upaya pemulihan lingkungan dari kerusakan dan bencana.⁵

Perjuangan kelompok *subaltern* untuk mendapat keadilan ekologis, kelangsungan hidup, dan kehidupan yang berkelanjutan direpresentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan mereka terangkum pada narasi aktivitas harian, terutama pada konteks relasi gender (Hendrastiti & Kusujarti 2020). FPE mengeksplorasi keterkaitan antara lembaga lingkungan, produksi pengetahuan, dan posisi perempuan untuk menguraikan bagaimana kelompok yang berbeda menanggapi masalah dan kebijakan lingkungan dengan cara yang berbeda. Pendekatan poskolonial memperluas FPE dengan fokus praktik lingkungan (Hayhurst & Centeno 2019; Mollett 2017).

Dalam metode feminis, baik peneliti maupun partisipan menjadi subjek penelitian dan mereka memiliki sudut pandang politik masing-masing terhadap fokus penelitian. Misbahul (2016) mencatat dari konferensi pedagogi feminis bahwa studi interseksionalitas atau perjumpaan berbagai struktur perlu dijadikan dasar analisis pada penelitian feminis. Interseksionalitas

berfokus pada pertemuan relasi kuasa dari berbagai dimensi yang berkontribusi untuk melestarikan dominasi struktural, penindasan, dan diskriminasi terhadap perempuan.

Hasil penelitian KEE dengan menggunakan indikator; otoritas, akses, ekonomi, dan pekerjaan mengungkapkan bahwa perspektif perempuan belum diperhitungkan sebagai isu penting dalam FLG (Setiahadi et al. 2020). Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam – secara umum – didorong untuk melestarikan lingkungan dan kehidupan di sekitarnya.⁶ Data artikel ini berasal dari dua desa: Desa Wringinputih, Muncar, Kabupaten Banyuwangi dan Desa Kedunggebang, Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi. Keduanya berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sejak tahun 2015, kedua desa masuk Kawasan Ekonomi Esensial (KEE). KEE Teluk Pangpang, Kabupaten Banyuwangi meliputi kawasan ekosistem karst, lahan basah⁷ mangrove dan gambut yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).⁸ Periode penelitian dilakukan antara Februari-Juni 2022 dalam rangka penyusunan *a preparatory research grant* dari program *Forest landscape Governance (FLG) Recoftc-Explore*, Sekretariat Bangkok.

Kedua desa penelitian adalah desa-desa yang berada pada kawasan hutan mangrove. Nelayan warga desa maupun dari luar desa aktif mencari kerang, udang, dan kepiting menggunakan sampan kecil bermesin, termasuk perempuan nelayan. Belakangan ini hasil tangkapan para nelayan sangatlah sedikit, situasi ini diperburuk dengan adanya restriksi KEE yang melarang sampan kecil masuk ke hutan mangrove. Menurut pengakuan nelayan, hasil tangkapan mereka biasanya dijual ke pasar lokal, dibeli tetangga dekat, atau untuk konsumsi sendiri. Secara khusus, narasi pengalaman yang ada pada artikel ini berasal dari pengalaman dan perspektif para perempuan nelayan di kedua desa.

Metode pengumpulan data riset ini adalah *Focus Group Discussions* (FGDs). Melalui FGD, tim peneliti mengutamakan *rapport* dengan partisipan. Salah satu cara yang paling nyaman adalah menggambar dan membuat aplikasi dengan kertas warna-warni untuk memvisualisasikan posisionalitas mereka pada program KEE hutan mangrove. Aktivitas itu sekaligus menggambarkan perubahan situasi yang mereka alami akibat krisis iklim.

Metode lain adalah *field talk*. *Field talks* adalah sebuah alternatif mendapat narasi dari subjek. *Field talk* dipandang lebih natural, lebih dekat, dan mendalam untuk memahami pikiran dan cara pandang subjek

dibanding *interview*. Subjek tidak “diarahkan” untuk menjawab apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh peneliti, melainkan penelitilah yang belajar memahami bagaimana duduk persoalan fenomena krisis ekologi terjadi, dan bagaimana warga lokal merespons situasi yang ada. Dengan *field talks*, krisis ekologi menjadi suatu percakapan yang luas dan komprehensif. Metode *field talk* sesuai dengan pendekatan ekologi dan politik yang menekankan pada makna yang luas, menyeluruh, serta fokus pada interaksi.

Fieldnotes merupakan model dari penelitian kualitatif. Pada studi feminis poskolonial, *fieldnotes* diadopsi karena kekuatan pendokumentasian dari situasi atau “*moment*”. Adapun situasi “*imperialisme*” yang berakar pada perbedaan dimensi gender, kelas sosial, pendidikan, kepercayaan, etnis, bahasa, orientasi politik, latar belakang budaya (interseksional) tidak boleh terlewatkan. Misalnya, pada penulisan artikel jurnal ini, seluruh informasi ada dalam *file*/penyimpanan berlapis: catatan proses diskusi, narasi kata demi kata dari subjek, dokumentasi situasi ketika diskusi berlangsung, dan fusi dari narasi dan sketsa (foto, gambar, figur, matriks) yang dibuat oleh peneliti saat diskusi.

Sebenarnya, pada setiap tahap metode yang diadopsi di atas, telah terjadi analisis yang berjalan atau *moving analysis*. Temuan-temuan momen “*penindasan*” dan momen dekolonisasi pada isu krisis ekologi, semua perubahan situasi hidup sehari-hari, segala respons mengatasi perubahan ekosistem (baik yang dramatis maupun yang perlahan) menjadi dasar dari analisis pada riset. Kerangka FPE memperkuat analisis studi dari tiga spektrum (Sundberg 2015), yaitu 1) pengetahuan dan praktik lingkungan berbasis gender; 2) hak alami gender dan kerentanan yang tidak setara terhadap perubahan lingkungan; dan 3) aktivisme dan organisasi lingkungan berbasis gender. Melengkapi kaidah analisis kualitatif, temuan momen “*imperialisme*” dan momen dekolonisasi pada feminis poskolonial di lapangan kemudian dianalisis dan direfleksikan dengan temuan riset terdahulu, untuk diekspansi persamaan, perbedaan, dan kebaruannya. Dengan menyandingkan temuan penelitian, maka ada kesadaran, keunikan, strategi perjuangan, ruang hidup yang dicapai dari perjuangan/perlawanan, serta rencana masa depan dari subjek.

Suara Subaltern, Dekonstruksi Pengetahuan, dan Dekolonisasi Metode Feminis

Fenomena Keagenan Perempuan

Salah satu aspek yang menarik di KEE Teluk Pangpang bila dilihat dari kerangka PFPE adalah

asesmen keterlibatan perempuan. Sejak diintroduksi tahun 2015, masyarakat setempat tidak memahami program KEE sebagai desain solusi untuk mengatasi situasi krisis ekologi yang berbasis warga; atau agenda global yang direplikasi untuk Indonesia, terutama Jawa Timur yang dimandatkan oleh program tersebut. Hal ini disebabkan pengenalan dan pendistribusian informasi terkait program tidak dilakukan secara inklusif dan merata. Diakui oleh peserta FGD, bahwa ada perempuan hadir pada sosialisasi, tetapi mereka tidak sepenuhnya mengerti, dan dipesan untuk menyebarluaskan kepada kelompok perempuan lain.⁹

Masyarakat melihat ada “*perebutan*” pengaruh pada program KEE.¹⁰ Meski sudah ada koordinasi dalam SK pengelolaan, tetapi implementasi di lapangan tidak menunjukkan kesesuaian antar Lembaga. Masyarakat sipil lokal menyebutkan bahwa masyarakat hanya menerima program, masyarakat diposisikan sebagai objek bukan sebagai subjek yang setara. Sepanjang program KEE berjalan tidak memperbaiki hidup masyarakat lokal; mereka tidak lagi mempersoalkan KEE. Masalah respons terhadap krisis mangrove terlihat tidak jelas. SK Kepengurusan program KEE memang ada, tetapi masyarakat tidak melihat implementasi pembagian kerja dari SK itu. Jangankan isu kesetaraan dan pengakuan terhadap eksistensi kelompok perempuan, mengandung keadilan/tidak bagi masyarakat lokal pun tidak jelas.¹¹

Tampak bahwa ada *gap* informasi antara KEE dan warga, yang tercermin dari dialog yang menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk terlibat, misalnya dalam pengembangan wisata. Mereka tahu bahwa desain wisata mangrove itu adalah desain tingkat desa atau kawasan, bukan untuk kepentingan individual. Warga pernah mengajukan usulan suatu program *agro silvo fisheries* (pemanfaatan lahan hutan untuk budi daya perikanan), tetapi sampai sekarang program yang pernah disuarakan itu masih macet.

Desain tercermin *topdown* ketika perempuan diposisikan pada kelompok sadar wisata (*Pokdarwis*), sementara dalam dialog, peserta perempuan masih mempertanyakan isu pengembangan ekowisata ini sebetulnya diperuntukkan bagi siapa? Bagaimana dengan kelompok perempuan? Apakah mereka dilibatkan dijadikan target penerima manfaat dari program? Partisipasi perempuan mengaku bahwa, *Pokdarwis* ini sebetulnya sudah ada bahkan sebelum program KEE ada. Artinya, sampai saat ini posisi perempuan masih sebagai objek dan bukan diposisikan sebagai pengampu kepentingan yang setara. “...kami masih masuk dalam lingkup objek atau alat dari pembangunan,

bukan keterlibatan pada rencana" (P2 2022, FGD Maret). Menurut para partisipan FGD, hanya Dinas Perikanan yang mengatur dan mengakomodasi tentang tangkapan hasil laut akan menjadi ruang gerak untuk keterlibatan perempuan.

FGD di Desa Kedunggebang dimulai dengan berbagi cerita tentang apa yang membanggakan dalam hidup. Ada tiga orang yang bercerita dan memilih gambar benda simbol dari identitasnya; misalnya: cerita partisipan pertama dan gambar rumah sebagai simbol tugas dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Partisipan kedua menceritakan kebanggaannya sebagai penjaga keselamatan semua anggota keluarga dan memberi gambar pagar untuk peran yang dijalannya. Partisipan ketiga, bercerita tentang kebanggaannya berprofesi penjahit baju. Mbak Dv menarasikan dirinya sebagai seseorang yang sejak kecil sudah pandai membantu ibu menjahit baju, memasang kancing, atau *ngesum*, atau pekerjaan lainnya. Makin besar makin banyak keterampilan yang dimilikinya, dan itu membuatnya bangga, simbolnya adalah baju.¹²

Lalu, partisipan berikutnya mbak Pn, ... lama sekali mbak Pn memulai ceritanya. Sambil tertawa dia mengaku tidak ada yang membanggakan dalam hidupnya. Semua orang di ruangan itu memberi dukungan, agar dia mengingat tindakan apa yang berharga. Salah satu partisipan menyebut

"... *la nragati anak kuliah soko golek kerang kae piye?*" (... lalu, biaya untuk kuliah anak dari mencari kerang dulu itu bagaimana?). Kemudian, dengan tersipu dia bertanya kembali: "... apa itu yang disebut membanggakan? Semua orang dalam ruangan itu setengah menjerit "... iyaaa! ..." (Pn 2022, FGD Maret).

Mulailah dia bercerita tentang aktivitasnya sehari-hari mencari kerang dan kepiting di hutan *tanjang*. Bagaimana cara mencari juga diperagakan olehnya, kedua tangannya ditarik ke depan dan digerakkan ke samping berulang-ulang sebagai tanda mengayuh sampan sambil mencari kerang. Juga diceritakan tentang hasil penjualan kerang, uang itu dia simpan dan digunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai di bangku kuliah. Ketika ditanya tentang simbol dari kebanggaannya itu apa, sekali lagi dia meringis dan bingung, "... apa ya? Sekali lagi Mas Kr memberinya ide "... piala!..." Kebetulan di ruangan itu ada 3 piala yang dipajang di bufet pemilik rumah. Dengan tertawa lebar mbak Pn menyetujui usul mas Kr pada simbol piala itu.

Selanjutnya, ketika dialog masuk isu KEE di Desa Kedunggebang, semua orang berpikir, menoleh kiri-

kanan, tersenyum dan bergumam, ragu-ragu ketika ditanya soal program KEE "... apa ya?... kata mereka". Sepertinya mereka baru menyadari bahkan tidak pernah menyebut hutan mangrove sebagai KEE. Lalu peneliti mencoba mengajak peserta mengingat-ingat melalui pertanyaan "biasanya kalau menyebut hutan di tempat mereka cari kerang, cari kepiting, tempat burung-burung bersarang ... itu namanya apa?" Mereka merespons, "oh itu ... biasanya disebut *cacalan, tanjang*, kawasan bakau". Partisipan juga diingatkan tentang tempat yang dirawat dan dijaga, bagaimana menyebutnya? "*sing perlu diuri-uri*" yang dimaknai sebagai sesuatu yang perlu dijaga. Peserta lain pun menyetujui bahwa kawasan yang perlu dijaga. Selanjutnya dalam dialog itu kami menyebut hutan mangrove sebagai "*kawasan sing perlu diuri-uri*" (KSPD). Peserta tidak merasa keberatan dengan sebutan itu (Im 2022, FGD Maret).¹³

Pada dialog ini, mbak Pn dengan berani dan keras menyatakan bahwa persoalan bahasa ini sangatlah penting. Banyak istilah dan bahasa yang digunakan oleh "orang-orang di atas itu" tidak mereka mengerti: "... Mereka itu pada ngomong apa? Kami tidak mengerti, maksudnya apa, kami disuruh apa?..." (Pn 2022, FGD Maret). Pada paragraf di atas, warga telah menyebut kawasan *tanjang* adalah kawasan yang *diuri-uri*, lokasi tempat mencari nafkah yang dijaga dan dirawat. Persoalan bahasa dan distribusi informasi yang tidak mengenal konteks lokal menghasilkan penyingkiran masyarakat lokal juga perempuan secara utuh dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.¹⁴

Narasi agensi perempuan di hutan mangrove tercermin melalui FGD. Persoalan bahasa menjadi penting untuk menghasilkan pelibatan dan akses yang adil. Belum lagi ada gap antara pengetahuan lokal dan pengetahuan pihak KEE. Menurut Mbak Pn, beberapa pencari kerang menebang sedikit akar bakau untuk membuka jalan bagi sampan. Sayangnya, tindakan ini oleh Perhutani dianggap merusak alam. Atas aksi itu, pihak Perhutani menangkap dan memenjarakan masyarakat setempat dengan tuduhan menebang akar bakau di lokasi konservasi. Menurut versi nelayan, penangkapan tersebut karena adanya kesalahpahaman; bahasa yang digunakan petugas atau pejabat yang terlalu tinggi dan tidak bisa dipahami oleh nelayan. Sebaliknya, para pejabat itu tidak tahu mengapa para perempuan nelayan memotong akar bakau "... untuk membuka jalan mencari kerang dan kepiting" (Pn 2022, FGD Maret). Berdasarkan FGD, peneliti memaknai bahwa masyarakat setempat memiliki kesadaran tentang pemeliharaan lingkungan, tetapi alur komunikasi yang tidak setara dan tidak

mengenal konteks dan kebutuhan masyarakat setempat membuat terjadinya kesalahpahaman dan kriminalisasi terhadap warga yang menjalankan kerja sehari-hari mereka. Untuk apa mereka merusak hutan bakau tempat mereka menggantungkan hidup.¹⁵

Sebagai perbandingan, pengalaman tumbuhnya keagenan perempuan pada solusi krisis ekologi terjadi di desa Kawasan dataran tinggi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Sumatra (Hendrastiti & Kusujarti 2022). Studi tersebut menunjukkan bagaimana kerangka feminis poskolonial mengungkapkan keagenan dan gerakan perempuan lokal dalam mengekspresikan hak-hak mereka untuk terlibat mengelola sumber daya alam. Kelompok perempuan yang berusaha meraih hak dan akses atas hutan adalah lapisan bawah dari kelas sosial desa. Kelompok tersebut awalnya juga dikriminalisasi dan harus mengakses hutan secara sembunyi-sembunyi dari pihak TNKS. Namun dengan inisiatif dari para perempuan dan fasilitasi dari organisasi lingkungan setempat, para perempuan TNKS memperjuangkan akses legal TNKS. Ketika perempuan terlibat secara utuh dan terjadi komunikasi yang setara juga terbuka antara masyarakat dan pihak TNKS, ternyata perempuan dapat menunjukkan bahwa pengetahuan keseharian mereka terkait lingkungan hutan berdampak signifikan pada pelestarian wilayah hutan. Hal ini dibuktikan dengan tidak terjadinya banjir dan penanaman hutan kembali. Di samping itu, perempuan juga mendapatkan pemberdayaan ekonomi dari hasil pengolahan hasil hutan (Boang Manalu, Subono & Putri 2022). Dalam studi tersebut, terlihat bahwa ketika perempuan terlibat secara setara, mereka dapat bernegosiasi dengan masyarakat, komunitas, lembaga formal, hingga pemerintahan daerah untuk menunjukkan bagaimana pengetahuan dan pengalaman mereka memainkan peran penting dalam melestarikan sumber daya di sekitar mereka.

Metode Feminis Poskolonial sebagai Dekolonisasi Metode

Salah satu yang menarik dari metode penelitian ini adalah *rapport*: pengalaman mengenali suara *subaltern*. *Rapport* yang dibutuhkan pada metode feminis poskolonial adalah proses situasi setara antar subjek penelitian. Partisipasi terbukti memiliki kehendak untuk terlibat dalam diskusi ketika situasi mereka aman, merasa berada di situasi yang setara, dan terhubung dengan peneliti (yang berasal dari luar komunitas). Momentum feminis dalam praktik metode poskolonial tidak tergantung waktu, meski waktu bisa menjadi prasyarat dari relasi dan keterhubungan antar subjek. Pengalaman

diperlakukan sebagai liyan adalah hambatan terbesar untuk menghadirkan relasi yang setara dalam *rapport*.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, sebagian besar komunitas *subaltern* cenderung diam dan menunggu; tidak progresif pada awalnya, mereka cenderung memperhatikan dan mempelajari seperti apa mereka diperlakukan (seperti yang dituliskan oleh DeLoughrey & Handley 2011; Enarson, Fothergill & Peek 2017; Candra 2019). Mereka pun telah hafal bahwa biasanya mereka diposisikan pada situasi tidak setara, menjadi pendengar, tidak bicara atau diam sebab tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh para pemilik kekuasaan dan pengambil keputusan. Padahal ketika mereka diberi ruang aman dan diperlakukan sebagai subjek setara kita akan dapat memahami apa hambatan yang mereka alami, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka ketahui juga telah dipraktikkan. Dalam proses penelitian ini dengan metode feminis dekolonial, peneliti dapat mempraktikkan *rapport* secara inklusif dan berkesetaraan.

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, kami menyadari bahwa periode *rapport* pada penelitian feminis poskolonial memerlukan penting adanya *gatekeeper(s)*. Peneliti mendapatkan kemudahan atas dukungan yang diberikan *gatekeepers*. *Gatekeepers* juga menjadi mediator untuk mempercepat penyamaan bahasa dan penyeteraan secara interseksional antara kelompok masyarakat lokal, terutama perempuan, dan peneliti. Hal yang menarik lainnya, bahwa *gatekeepers* juga bisa dapat belajar akan situasi dan metode mendekati subjek dan praktik dialog yang lebih setara dan terbuka. Mereka berkesempatan menemukan fenomena sosial yang sebelumnya tidak terungkap selama dialog berlangsung. Melalui cerita dan dialog dalam ruang aman, banyak kisah yang sebelumnya tidak diketahui diartikulasikan dan memperluas pemahaman bersama.

Kami mengetahui bahwa ada berbagai istilah lokal yang dipakai untuk merujuk hutan mangrove antara lain *alas etan kono*, *sembulungan*, *segoro etan*, *tanjang*. Menariknya, dari berbagai istilah yang umum dikenali, tidak satu pun masyarakat sekitar mangrove menyebut kawasan *tanjang* sebagai KEE. Misalnya, KEE itu adalah program di lokasi *tanjang*.¹⁶ Artinya, ada *gap* pemahaman antara program pemerintah dengan pemahaman masyarakat setempat. Menurut penulis, keberhasilan sebuah program pelestarian alam yang melibatkan masyarakat setempat, setidaknya harus berangkat dari konteks budaya setempat. Komunikasi yang setara dan dapat dipahami harus menjadi hal yang diperhatikan dalam implementasi program.

Hubungan antara perempuan dan *tanjang* merefleksikan identitas hubungan ekologis. Bahwa mereka sebagai subjek dari kelompok mana mereka terikat, dan identitas relasinya dengan *tanjang*. Pada gambar yang mereka buat terungkap bagaimana mereka menempatkan diri (posisionalitas) nya terhadap *tanjang*, seberapa dekat, seberapa jauh, adakah kaitannya dengan proyek *tanjang*, adakah keterhubungannya, dan semacamnya.

Metode dialog FGD ini efektif untuk memulai *rapport* karena ada alasan bagi setiap orang untuk menceritakan siapa dirinya, keagenan mereka di keluarga, di komunitas, dan eksistensi mereka pada area sosial yang lebih luas. Metode itu juga untuk melihat relasi ekologi mereka dengan program KEE, dan keberadaan/penerimaan program di dalam hidup komunitas sehari-hari. Setidaknya menjadi awal temuan tentang respons terhadap krisis iklim dalam bentuk zona ekonomi eksklusif mangrove bukan bagian dari hidup komunitas lokal.

Dialog FGD ini adalah alat ukur terkait seberapa efektif internalisasi program secara sosial bagi masyarakat. Ada kecenderungan masyarakat hanya menerima implementasi program karena ada proyek yang mengikutinya. Orientasi pelibatan bukan pada kelestarian *tanjang* untuk tambatan dan keselamatan ruang hidup melainkan sekadar motif proyek.

Meskipun dalam diskusi terungkap bahwa masyarakat terlatih untuk mengampanyekan manfaat dari KEE, dan terungkap rasa terima kasih mereka pada program; masih ada narasi yang memperlihatkan keterputusan antara agenda global/nasional dan kepentingan rakyat lokal. Misalnya, ada narasi UDD (*uang dewe-dewe*) dalam menjalankan program. Untuk mengadakan bibit dan penanaman mangrove, UDD adalah narasi tentang dana swadaya untuk penyelamatan hutan mangrove. Mereka pikir penyediaan bibit mangrove dan penanamannya didukung oleh dana pemerintah sebab itu adalah program pemerintah. Narasi itu disertai dengan nada rasa berat sebab rakyat harus bekerja dan mengeluarkan dana sendiri untuk mencapai keberhasilan tujuan program.

Narasi di atas bermakna *multifaced*, pertama, bahwa warga harus berkegiatan untuk menyukseskan program pelestarian mangrove. Kedua, warga beruntung dengan program pelestarian mangrove sebab ada peluang mengembangkan bisnis atau mulai berbisnis. Ketiga, lama-lama muncul pengetahuan dan kesadaran bahwa hutan mangrove akan menyelamatkan ruang hidup warga. Ada narasi dalam dialog

"... katanya hutan *tanjang* bisa memecah ombak dan mencegah banjir, abrasi ..." (P2 2022, FGD Maret).

Ungkapan "katanya" merefleksikan bahwa fungsi *tanjang* justru diajarkan oleh orang luar kepada warga...bukan *genuine local knowledge* dari masyarakat pantai yang diturunkan dari leluhur kepada mereka.¹⁷

FGD juga menemukan bagaimana pemahaman para perempuan setempat terkait posisi mereka terhadap hutan *tanjang*. Fakta menunjukkan bahwa para perempuan berada di luar lingkaran skema program KEE. Ada seorang ibu dengan ragu-ragu bertanya sambil memasang *post-it*"... saya di sini, di garis lingkaran, karena saya ikut PKK; dan program kegiatan PKK dimasukkan ke KEE itu. Tapi hanya sedikit perempuan diikuti, apalagi perempuan yang mencari kerang dan kepiting tidak ikut terlibat di PKK" (Tr 2022, FGD Maret). Melalui FGD kami menemukan bahwa program bagi perempuan dalam KEE hanya melibatkan perempuan elite desa. Kalau saja pertemuan itu dihadiri oleh lebih banyak perempuan pencari kerang dan kepiting, maka akan tampak bagaimana posisionalitas perempuan terhadap KEE.¹⁸ Suara perempuan pada FGD menunjukkan gambaran yang eksis tentang lapisan sosial kelompok perempuan. Meski tak semua partisipan FGD adalah bagian dari kelompok *subaltern*, namun kehadiran perempuan pencari kerang dan kepiting memperjelas adanya interseksi kelas sosial di dua desa hutan mangrove.

Berkaitan dengan isu ini, disebutkan oleh de Souza (2019) bahwa ada pergeseran solidaritas feminis dari artikulasi intra-gerakan yang utama dari kelompok-kelompok feminis. Di Amerika Latin, gerakan feminis bergabung dengan sejumlah besar organisasi akar rumput berlabel anti-kapitalis, dan gerakan serikat pekerja – menuntut agar kekerasan terhadap perempuan dihubungkan dengan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, seperti eksploitasi kapitalis dan prekarisasi pekerjaan hingga isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan gender dan hak-hak reproduksi. Agenda inklusivitas dan konektivitas antara isu-isu kelas, gender, seksualitas, etnisitas, dan ras, tidak hanya melegitimasi hak menyatakan pendapat, tetapi juga suatu tuntutan pada materialitas tubuh perempuan dan kebutuhan untuk merebut kembali hak-hak perempuan atas tubuh mereka.

Merangkum analisis keagenan perempuan *subaltern* pada isu krisis ekologi dalam kerangka feminis poskolonial, kami melihat bahwa ada pengetahuan terkait dengan bahasa dan tubuh yang tergenderkan. Ada konteks bahasa dan makna yang berbeda yang

dimiliki oleh komunitas *subaltern* dengan penguasa. Bagi perempuan *subaltern*, tindakan dan pemikiran mereka berkelindan (*embedded*) dengan identitas gender. Namun program pelestarian lingkungan kerap membangun subjek sebagai tubuh yang netral gender sehingga gagal mengenali pengalaman, kebutuhan, dan pengetahuan perempuan di tingkat lokal. Untuk memastikan pelibatan yang inklusif dan pengelolaan lingkungan yang adil, interseksi antara gender, geografis, kelas sosial, dan berbagai faktor lainnya harus dikenali agar dapat menghasilkan respons yang memadai dan berkeadilan. Seperti yang dinarasikan oleh para pemikir feminis ekologis khususnya dari pemikir poskolonial, suara *subaltern* penting untuk dijadikan sumber pengetahuan untuk merespons krisis iklim.

Penutup

Keagenan perempuan pada isu krisis ekologi itu ada, narasi dan bahasa yang dimiliki oleh komunitas *subaltern* lah yang berbeda. Kerangka feminis poskolonial dan metodologi feminis politik ekologi (FPE) menjadi jembatan yang memungkinkan narasi komunitas *subaltern* itu terdengar, posisionalitas yang interseksional tergambar, dan untuk selanjutnya diakui adanya. Berdasarkan *field talk* di lapangan, keagenan komunitas *subaltern* terbentuk karena kesadaran individual dan kelompok itu eksis dalam bentuk "imperialisme" pengetahuan; dari cerita itulah yang menjadi tantangan bagi pengakuan pengetahuan.

Pengakuan atas produksi pengetahuan dari komunitas *subaltern* adalah suatu dekolonisasi dari diskursus sosial, termasuk untaian feminisme sendiri. Ide tentang perancangan program pembangunan, terutama merespons krisis ekologi yang partisipatif, tidak akan ada artinya tanpa upaya dekolonisasi kerangka dan metodologi dari penelitian sosial, khususnya isu lingkungan. Artikel ini memang mengajukan premis pengandaian tentang pengakuan keagenan perempuan *subaltern*; namun senyatanya produksi dan reproduksi pengetahuan dari komunitas perempuan *subaltern* terus berlangsung, dan sedang mencari celah pengakuan publik ilmiah. Dekolonisasi yang terjadi bersifat aktual dan praktis serta menempuh jalan politik karena di lapangan harus menghadapi regulasi keterlibatan.

Daftar Pustaka

Boang Manalu, A.G., Subono, N.S., & Putri, R.D.W. 2022. "Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi",

Jurnal Perempuan. Vol 27 No. 1 April 2022, hlm. 85—99; <https://doi.org/10.34309/jp.v27i1.666>

Brah, Autar, dan Ann Phonix. 2004. "Critical Review on modernist Feminism", *Journal of International Studies* 5, No. 3 (May), hlm. 76—91.

Brook, Ann. 1997. *Postfeminism*. Routledge: New York.

Candra, Priskardus Hermanto. 2019. "Criticism of Postcolonial Feminism to Disassembly Patriarchy in Manggarai Culture", *Jurnal Pendidikan & Kebudayaan MISSIO* 11, No. 1 (Januari): hlm. 107—116.

Dar, Firdous Ahmad dan Priti Bhatt. 2019. "Ecocriticism: A Study of Relationship Between Literature And Environment", *International Journal Of Research In Education And Psychology (IJREP), An International Peer Reviewed Journal*, hlm. 29—33.

DeLoughrey, Elizabeth dan George B. Handley (eds.). 2011. *Postcolonial Ecologies, Literatures of the Environment*. Oxford University Press: Oxford.

de Souza, Natália Maria Félix. 2019. "When the Body Speaks (to) the Political: Feminist Activism in Latin America and the Quest for Alternative Democratic Futures". *Contexto int*, 41, 1, Rio de Janeiro Jan./Apr. 2019. SPECIAL ISSUE GENDER IN THE GLOBAL SOUTH.

Elmhirst, Rebecca. 2011. "Introducing New Feminist Political Ecologies", *Geoforum* 42, No. 2, hlm. 129—132.

Enarson, Elaine, Alice Fothergill, dan Lori Peek. 2017. "Gender and Disaster: Foundations and Directions". *Handbook of Disaster Research*. Springer, hlm. 130—146.

Harding, Sandra. 1998. *Is Science Multicultural? Postcolonialism, Feminism, and Epistemologies*. Indiana University Press: Bloomington and Indianapolis.

Hayhurst, Lindsay, M.C., Lidieth del Socorro Cruz Centeno. 2019. "We Are Prisoners in Our Own Homes: Connecting the Environment, Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health Rights to Sport for Development and Peace in Nicaragua". *Sustainability* 2019, 11, 4485.

Hendrastiti, Titiek K. 2014. *Perempuan Lokal vs Tambang Pasir Besi Global*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.

Hendrastiti, Titiek K. dan Siti Kusujarti. 2020. "Hidden Narratives: The Struggle of Sumba Women in Saving Fresh Water", *Proceedings of the 3rd International Conference on Gender Equality and Ecological Justice*, GE2J 2019, 10—11 July 2019, Salatiga, Central Java, Indonesia. EAI.

Hendrastiti, Titiek K., dan Siti Kusujarti. 2022. "They Dare to Speak: Uncovering Women's Hidden Agency". *Local Responses to Global Challenges in Southeast Asia: A Transregional Studies Reader*. World Scientific.

Kurauchi, Yuko, Antonio La Vina Nathan Badenoch Lindsey Fransen. 2005. *Decentralization of Natural Resources Management: Lessons from Southeast Asia, Synthesis of Decentralization Case Studies Under The Resources Policy Support Initiative (Repsi)*. Diakses pada 10 Oktober 2022. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pbaaa192.pdf. <https://wri-indonesia.org/en/publication/decentralization-natural-resources-management>.

Kusujarti, Siti. 2017. "Tsunami, Civil Society, and Shari'ah Law in Aceh, Indonesia: Intersection of Disaster, Decentralization and Gender Relations." in *The Governance of Local Communities: Local Perspectives and Challenges* by Thom Reilly (editor). Nova Publishers: New York.

Misbahul, Andi. 2016. "Pedagogi Feminis, upaya humanisasi dengan kajian interseksionalis". *Warta Feminis*, 27 September 2016. Diakses pada 10 Oktober 2022. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/pedagogi-feminis-upaya-humanisasi-dengan-kajian-interseksionalitas>.

Mohanty, Chandra T. 2008. "Under Western Eyes: Feminist Scholarships and Colonial Discourses", in *The Post Colonial Studies Reader, Second edition*. Routledge: London and New York.

Mollett, Sharlene. 2017. "Gender's Critical Edge. Feminist political ecology, postcolonial intersectionality, and the coupling of race and gender." *Routledge Handbook of Gender and Environment*. Routledge: London and New York.

Narayan, Uma, dan Sandra Harding. 2000. *Decentering the Center: Philosophy for a Multicultural, Postcolonial, and Feminist World*. Indianapolis University Press: Bloomington and Indianapolis.

Pollock, Anne, dan Banu Subramaniam. 2016. "Resisting Power, Retooling Justice: Promises of Feminist Postcolonial Technosciences". *Science, Technology and Human Values*, hlm. 951-966.

Resurreccion, Bernadette, P. dan Rebecca Elmhirst. 2013. *Gender and Natural Resource Management. Livelihoods, Mobility, and Interventions*. Routledge: New York.

Resurreccion, Bernadette, P. 2017. "Gender and Environment in the Global South: from 'women, environment, and development' to feminist political ecology". *Routledge Handbook of Gender and Environment*. Routledge: London and New York.

Rocheleau, Diane, Barbara Thomas-Slayter dan Esther Wangari. 1996. *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*. Routledge: New York.

Saunders, Kriemild, ed. 2004. *Feminist Post-Development Thought: Rethinking Modernity, Postcolonialism and Representation*. Zed Books: London.

Setiahadi, Rahmanta. 2020. Kajian Sosial Masyarakat Sekitar Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Pangpang Banyuwangi, Jawa Timur: Bahan Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem esensial Teluk Pangpang. ARuPA and USAID-BIJAK.

Spivak, Gayatri C. 2008. "Can the Subaltern Speak?" *The Post Colonial Studies Reader, Second edition*. Routledge: London and New York.

Sundberg, Yuanita. 2015. "Feminist Political Ecology". In *The International Encyclopedia of Geography*. Wiley-Blackwell & Association of American Geographers.

Tierney, Kathleen. 2019. *Disasters. A Sociological Approach*. Polity Press: Cambridge, UK and Medford, USA.

Catatan Akhir

1 Penelitian lapangan yang dilakukan dalam rangka a Preparatory Proposal Grant dari Recoftc-Explore, Maret 2022.

2 Saat ini, kekayaan hayati itu ternyata mengalami krisis dan *endanger*; bukan hanya karena perubahan dramatis semesta terhadap ekosistemnya, tetapi juga ada banyak tekanan kegiatan manusia (*human*) yang mempercepat kepunahan keragaman hayati itu. Skema KEE itu disusun untuk mempertahankan kelestarian lokasi hutan mangrove, mengundang partisipasi warga lokal dan menjaga Kesejahteraan masyarakat. *Fieldwork* menunjukkan betapa besar *hidden phenomena* dari agenda KEE Teluk Pangpang. KEE adalah pilihan penyelamatan ekosistem dalam situasi serba krisis iklim ini. Desain KEE untuk menyentuh upaya perbaikan *livelihood* kelompok masyarakat sekitar kawasan itu yang kurang. Maka konteks studi dekolonisasi area KEE sangat penting demi merespons lebih jauh atas dampak sosio-politik lokalnya bagi parapihak.

3 Konsep gender adalah inyoasi dari ilmuwan feminis sehingga basis diskursusnya sering disebut bersama-sama.

4 Ternyata praktik kolonialisme tetap berlangsung, bermetamorfosis, dan bermutasi menjadi imperialisme dan tertanam pada patriarki pribumi (Candra, 2019). Studi Candra (2019) di Manggarai, NTT menunjukkan bahwa marginalisasi perempuan dilegitimasi oleh budaya lokal dan tradisi adat melalui pola patriarki. Narasi dan cerita lokal merujuk pada legitimasi pola patriarki ini, sekaligus mengungkap suara kelompok *subaltern* bahwa terdapat fenomena sosial yang kompleks, yang menjadi akar kerentanan dan resistensi kelompok pinggiran.

5 Relasi ekologi dan politik dalam kerangka FPE dapat mengungkap fenomena keragaman gender dan ketimpangan relasi yang tersembunyi melalui tiga bidang utama ((Sundberg 2015, hlm. 1) Pengetahuan dan praktik lingkungan berbasis gender; 2) Hak alami gender dan kerentanan yang tidak setara terhadap perubahan lingkungan; dan 3) Aktivisme dan organisasi lingkungan berbasis gender.

6 Perspektif gender yang diterapkan dalam penelitian mendorong alternatif solusi pada kelestarian lanskap hutan lebih baik, yang berfokus pada hak dan keterlibatan perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya.

7 Danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut dengan tidak lebih dari enam meter.

8 Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan (Dekonsentrasi) bidang kehutanan sejak tahun 2016 dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah. Menurut Permen LHK No. P.66/Menlhk-Setjen/2015 salah satu kewenangan penetapan dan pengelolaan KEE termasuk di dalam kerangka pelimpahan ini (Setiahadi 2020). Proses penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial menurut Permen LHK dilakukan bertahap, yaitu: 1) Tahap identifikasi dan inventarisasi kawasan ekosistem esensial. 2) Tahap fasilitasi pemolaan (perancangan) kawasan ekosistem esensial. 3) Tahap penetapan kawasan ekosistem esensial. 4) Tahap penyusunan rencana aksi kawasan ekosistem esensial. 5) Tahap fasilitasi implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial. 6) Tahap monitoring dan evaluasi pengelolaan (Setiahadi 2020).

9 Pada dialog ada narasi tentang (1) penetapan lokasi program KEE adalah di lokasi *tanjang*. Sayangnya, (2) masyarakat masih

- bingung mengapa perlu ditetapkan KEE, apa fungsi dari program?, apa manfaat program?, untuk siapa keberhasilan program? (3) Masyarakat juga bertanya-tanya, apa bedanya program KEE dengan kawasan hutan *tanjang* yang lama. Informasi yang penting adalah bahwa tahun 2022 ini sosialisasi tidak ada lagi, baik dari forum pengelola KEE atau institusi pemerintah (Desa, Kabupaten, Provinsi). Respons masyarakat menyangkut *livelihood* menunjukkan ada kekhawatiran warga terkait hilangnya mata pencarian. Pada program KEE, asas konservasi dirasakan lebih kuat, bagaimana posisi warga dan kelangsungan kehidupannya. Isu ini sebenarnya juga menyangkut bentrok pendekatan, atau bentrok orientasi tentang pelestarian lingkungan. Lingkungan fisik yang utama, penduduk kedua. Informasi yang tidak jelas membuat warga desa sekitar mangrove mengabaikan batas KEE. Mereka beraktivitas seperti biasa di Kawasan *tanjang*, tidak ada bedanya dengan masa sebelum ada program KEE.
- 10 Masyarakat melihat adanya “ego sektoral” dari para pemangku kepentingan, misalnya antara Dinas Sosial, BKSDA, NGO, Dinas Perikanan dan Kelautan.
 - 11 Tata hubungan masyarakat dengan program KEE antara lain: (1) KEE ditetapkan dengan SK Gubernur No. 188; dengan SK tersebut menjadi payung hukum untuk melakukan sosialisasi. Namun warga menilai bahwa sosialisasi masih sangat kurang. Salah satu contoh keterbatasan sosialisasi adalah “mampetnya dialog masyarakat dengan kades dan pihak berwenang”. Akibatnya, *law enforcement* dan implementasi program kurang dirasakan oleh warga desa. Program KEE itu seperti program yang berjalan “sendiri”, sementara masyarakat melakukan kegiatan sendiri juga. Kegiatan perempuan, aktivitas produktif perempuan termasuk yang tidak ada koneksinya dengan KEE.
 - 12 Mbak Dv dan mbak Pn, kedua perempuan tengah baya itu diundang karena keduanya aktif dalam beberapa aktivitas pendampingan hutan mangrove.
 - 13 Istilah KEE tidak dipakai sehari-hari. Karena secara geografi lokasi program adalah di kawasan *tanjang* tempat warga melakukan aktivitas, maka mereka tetap menggunakan istilah *tanjang*. Ada yang berubah, yaitu bahwa sekarang banyak kendala, karena berbeda metode dan cara mencari kerang, kepiting, dan udang di kawasan *tanjang*. Perubahan metode inilah yang menjadi kesenjangan/*gap* antara otoritas program dengan warga. Perbedaan ini tidak simpel sebab perbedaan ini menjadi bentrok kepentingan secara interseksional (gender, kelas, etnis, bahasa) yang berasal dari perbedaan bahasa.
 - 14 Rata-rata masyarakat itu mengerti arti pentingnya *tanjang*. *Tanjang* penting untuk penghidupan. Bagi masyarakat nelayan, terutama, *tanjang* berguna untuk melindungi desa dari banjir dan tsunami. Apakah dengan kesuburan dan penanaman kembali *tanjang*, jumlah kerang dan kepiting bertambah banyak? Peserta dialog ragu-ragu, nampaknya tidak. Setelah situasi hutan *tanjang* membaik, tidak otomatis populasi kerang dan kepiting meningkat. Beberapa nelayan merasakan saat ini kerang dan kepiting sulit untuk dicari; bukan karena jumlahnya yang menyusut tapi karena dengan adanya akar bakau yang menghalangi perahu kecil nelayan lewat, nelayan sulit menembus akar-akaran di hutan itu.
 - 15 Ketika ditanya siapa para nelayan itu? Apakah semua nelayan hanya dari desa sekitar hutan *tanjang*? Apakah ada nelayan dari luar kawasan? Mereka menjawab bahwa para nelayan itu berasal dari desa setempat maupun dari luar desa, semuanya bisa/boleh mendapatkan hasil laut.
 - 16 Metode yang dipakai adalah menggambar dan menempel *post-it* warna-warni pada kertas HVS. Pada artikel ini, fokus analisis diberikan kepada partisipan perempuan.
 - 17 Yang perlu dicari pada riset mendatang: bagaimana komposisi warga desa itu, *indigenous* dan migran.
 - 18 Pak An pun, tokoh desa yang banyak menjalankan berbagai program desa, mengatakan bahwa dirinya jauh dari program KEE tersebut (posisi pak An berada di luar lingkaran). Pak Im menempelkan *post-it* di dalam area program karena dia beberapa kali diundang dan mengikuti sosialisasi di Balai Desa maupun di tempat lain. Pada beberapa pelaksanaan program KEE, pak Im terlibat. Tetapi toh ia tidak menyatakan diri berada di pusat lokasi KEE di desa.

